

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ekonomi, perbaikan kinerja birokrasi akan biasa memperbaiki iklim investasi yang amat diperlukan oleh Bangsa Indonesia untuk bisa keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Otonomi Daerah di Indonesia di dasarkan pada Undang-undang nomor 22 tahun 1999 *juncto* Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 *juncto* Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dengan system pemerintahan desentralisasi dan sudah mulai efektif dilaksanakan sejak 1 januari 2001.

Umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan sumber daya manusia (aparap maupun masyarakat), sumberdaya alam, kemampuan keuangan, kemampuan manajemen, kondisisosial budaya masyarakat dan karakteristik ekologis.

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah kabupaten dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim: 2007).

Belakang sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam penggunaan APBD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan keuangan yang telah disusun dan disampaikan tersebut harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Analisis laporan keuangan sangat penting dilakukan untuk menciptakan pemerintah yang baik (*good governance*) dan memberikan informasi tentang kebenaran laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan salah satu organisasi pemerintah daerah yang memberikan suatu pelayanan public dalam bidang administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat kota tebing tinggi mempunyai misi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan profesional.

Agar pengelolaan keuangan daerah maupun APBD dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dan dapat memenuhi kebutuhan pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2018 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
(dalam ribuan rupiah)

No	Uraian	Tahun	
		2017	2018
4	PENDAPATAN-LRA	11.625.000	13.725.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA	11.625.000	13.725.000
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	11.625.000	13.725.000
5	BELANJA	4.172.434.156	4.541.983.456
5.1	BELANJA OPERASI	4.083.299.746	4.171.598.456
5.1.1	Belanja Pegawai	2.308.480.095	2.136.627.043
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.774.819.651	2.034.971.431
5.2	Belanja Modal	89.134.410	370.385.000
5.2.2	Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin	89.134.410	370.385.000
	SURPLUS (DEFISIT)	(4.160.809.156)	(4.528.258.456)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.160.809.156)	(4.528.258.456)

Sumber: Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tebing (data diolah)

Berdasarkan pada tabel 1 di atas, diketahui bahwa realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara umum cenderung mengalami peningkatan, meskipun juga terjadi peningkatan pendapatan pada tahun 2018 yang mengakibatkan terjadi defisit anggaran senilai Rp 4.528.258.456; Pendapatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil. Selanjutnya ditinjau dari aspek belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi dan belanja modal, belanja operasi memiliki porsi pengeluaran yang lebih tinggi jika dibanding dengan belanja modal. Realisasi kedua belanja tersebut cenderung mengalami peningkatan di setiap tahun. Hanya belanja pegawai yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan pada Dinas Kependudukan Catatan

Sipil Kota Tebing Tinggi”. Analisis kinerja keuangan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan Pemerintah Daerah Kota Tebing dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2017-2018. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan pada penelitian ini adalah Rasio Kemandirian, Rasio efektivitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini ialah kinerja keuangan pada dinas kependudukan dan catatan sipil kota Tebing Tinggi belum sesuai dengan SAP PP No.71 Tahun 2010.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas maka penelitian ini dibatasi kepada laporan keuangan dan kinerja keuangan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tahun 2017 dan 2018.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah prosedur penyusunan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sudah sesuai dengan SAP PP No.71 Tahun 2010?

2. Apakah kinerja keuangan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi.
2. Untuk mengetahui pelaporan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sesuai dengan SAP No.71 Tahun 2010.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mengenai penyajian laporan keuangan dan kinerja keuangan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi.
2. Bagi instansi, memberikan informasi tambahan tambahan yang dapat dipakai oleh pemerintah setempat sebagai bahan evaluasi dan koreksi untuk membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kinerja keuangan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi penelitian dalam bidang penelitian sejenis yang berkaitan dengan kinerja keuangan.